



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU KAJENG SUSILA, S.SOS
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PERTANAHAN
3. NHK : 490099

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.015.000.000

1. Tanah Seluas 646 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah Seluas 1450 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000
3. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/55 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/55 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 74.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.000.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 13.154.582**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.161.154.582



III. HUTANG

Rp. 340.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.821.154.582

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.